

Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas *Good Governance* Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia

Freddy Aktif Era Sianturi^{1*} dan Adenantera Dwicaksono²

¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Indonesia

² Program Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB, Bandung, Indonesia

Korespondensi: * freddybpkp@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205> | halaman: 38 - 59

Dikirim: 16-02-2023 | Diterima: 25-03-2023 | Dipublikasikan: 31-03-2023

Abstrak

Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas pemerintah sebagai asas *good governance* terhadap pembangunan daerah pada 446 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional, wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional dan wilayah KBI, namun berpengaruh tidak signifikan di wilayah KTI. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah, hal ini karena dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah turut serta dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Kemudian, mengingat Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar dunia, memerlukan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir kurang dari target tersebut, yakni hanya 4% per tahun selama 2015-2022, maka perbaikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas *good governance* dapat menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.

Kata kunci: *good governance*; akuntabilitas keuangan; akuntabilitas kinerja; pembangunan daerah.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hubungan antara *good governance* dan proses pembangunan menjadi salah satu bidang penelitian paling penting dalam dunia internasional. Sebagian besar literatur berfokus meneliti apakah *good governance* yang lebih baik berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi (Sen, 2014). Menurut Asian Development Bank (1995), *good governance* merupakan paradigma baru manajemen pembangunan, yang dibutuhkan untuk memastikan serangkaian kebijakan pembangunan memiliki dampak yang diinginkan. *Good governance* telah ditempatkan sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi modern terutama di negara berkembang (Kraipornsak, 2018:1). Kajian ekonometrik Kaufmann *et al.* (1999) telah memberikan bukti empiris tentang hubungan signifikan antara *good governance* dengan hasil pembangunan berupa pendapatan per kapita (*per capita incomes*), angka kematian bayi (*infant mortality*), dan tingkat literasi orang dewasa (*adult literacy*), di lebih dari 150 sampel negara. Hal ini sejalan dengan penelitian Liu *et al.* (2018:17) yang juga memberikan kesimpulan bahwa *good governance* memberikan efek positif signifikan terhadap capaian pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi wilayah daerah provinsi di Cina. Kemudian, Kraipornsak (2018:11) turut menyimpulkan adanya pengaruh positif signifikan *good governance* terhadap hasil pembangunan berupa peningkatan pendapatan per kapita di 16 sampel negara Asia, dengan simulasi setiap kenaikan *good governance* sebesar 1% dari tahun sebelumnya, dapat membantu meningkatkan pendapatan per kapita sebesar US \$ 31,34 atau 0,54% per tahun.

Para pencetus *good governance* seperti World Bank, UNDP, ADB, OECD, dan KNKG, telah merumuskan elemen-elemen dasar yang menjadi karakteristik dari *good governance*. Dari berbagai karakteristik tersebut, ditetapkan bahwa konsep akuntabilitas menjadi salah satu asas atau prinsip *good governance* yang paling utama, sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Sumber: Diadaptasi dari IFAD (1999), ADB (1995), World Bank (1992), UNDP (1997), KNKG (2008)

Akuntabilitas merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini karena akuntabilitas menjadi asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 28 Tahun 1999). Kehadiran konsep akuntabilitas berkembang seiring dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia. Implementasi prinsip akuntabilitas diwujudkan salah satunya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa prinsip akuntabilitas merupakan salah satu umum penyelenggaraan negara. Berdasarkan analisis atas regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku di Indonesia saat ini, terdapat setidaknya dua aspek akuntabilitas pemerintah yang dapat mencerminkan *good governance* dan relevan dengan proses pembangunan, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.

Pertama, akuntabilitas keuangan. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan dengan asas akuntabilitas. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan penyusunan laporan pengelolaan keuangan oleh pemerintah, untuk selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (UU Nomor 1 Tahun 2004). Sebagai media akuntabilitas publik, laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit oleh BPK berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh publik kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Kedua, akuntabilitas kinerja. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah (Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021). Pemerintah menyusun dan menyajikan laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006). Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah secara terukur dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan melalui laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun secara periodik. Laporan SAKIP tersebut kemudian dievaluasi oleh Kementerian PANRB untuk menilai implementasi sistem akuntabilitas kerjanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji secara khusus pengaruh akuntabilitas (*accountability*) sebagai asas *good governance* terhadap pembangunan daerah di Indonesia, dengan fokus pada pengaruh aspek akuntabilitas keuangan pemerintah dan aspek akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap dimensi ekonomi dan dimensi sosial pembangunan daerah berbasis kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menangkap kemungkinan aspek akuntabilitas yang berbeda yakni akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja mempengaruhi proses pembangunan daerah di Indonesia secara berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah akuntabilitas sebagai asas *good governance* berpengaruh

terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia?". Pertanyaan penelitian tersebut dielaborasi menjadi empat pertanyaan detail sebagai berikut:

- 1) Apakah akuntabilitas keuangan pemerintah berpengaruh terhadap dimensi ekonomi pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia?
- 2) Apakah akuntabilitas kinerja pemerintah berpengaruh terhadap dimensi ekonomi pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia?
- 3) Apakah akuntabilitas keuangan pemerintah berpengaruh terhadap dimensi sosial pembangunan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia?
- 4) Apakah akuntabilitas kinerja pemerintah berpengaruh terhadap dimensi sosial pembangunan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia?

1.3. Tinjauan Pustaka

1.3.1. *Good Governance* dan Pembangunan

World Bank sebagai produsen dokumentasi yang paling banyak membahas *good governance* sebagai alat umum dalam proses pembangunan internasional, mendefinisikan *governance* adalah “*the manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and social resources for development*” (World Bank, 1992). World Bank mengidentifikasi tiga aspek *governance* yang berbeda yaitu rezim politik, proses kekuasaan dijalankan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan, dan kapasitas untuk merancang, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan. World Bank menyebutkan bahwa *good governance* identik dengan manajemen pembangunan yang baik. Manajemen yang akuntabel dan transparan, yang dapat mendukung administrasi yang efektif, memperkuat supremasi hukum, sehingga dapat mewujudkan efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan implementasi *good governance* di Indonesia diawali saat terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Saat itu, lembaga multilateral seperti World Bank, IMF, dan ADB memandang bahwa buruknya tata kelola (*bad governance*) baik publik maupun swasta menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekonomi tersebut. Salah satu contoh *bad governance* dimaksud adalah tidak adanya akuntabilitas (*accountability*), sehingga berdampak pada penyalahgunaan kewenangan pejabat publik untuk kepentingan pribadi dan golongan. IMF berpendapat bahwa tata kelola yang buruk tersebut mengancam integritas pasar, menghambat persaingan sehat, dan membahayakan pembangunan ekonomi (IMF, 2018).

1.3.2. Akuntabilitas dalam Konteks *Good Governance*

Berdasarkan rumusan elemen-elemen dasar yang menjadi karakteristik dari *good governance* oleh para pencetus *good governance* itu sendiri, yaitu World Bank, ADB, dan UNDP, ditetapkan bahwa konsep akuntabilitas menjadi salah satu asas atau prinsip *good governance* yang paling utama. World Bank (1994) dalam laporan berjudul *Governance: The World Bank’s Experience*, menyebutkan ada empat pilar yang menjadi dasar *good governance* yaitu: (1) *Accountability*, (2) *Transparency*, (3) *Rule of Law*, (4) *Participation*. Sementara itu, ADB (1995) dalam makalah kebijakan berjudul *Governance: Sound Development Management*, mendefinisikan *good governance* ke dalam empat asas yaitu: (1) *Accountability*, (2) *Participation*, (3) *Predictability*, (4) *Transparency*. Kemudian, UNDP (1997) dalam buku berjudul *Governance for Sustainable Human Development*, menyatakan ada sembilan karakteristik esensial dari *good governance* yaitu: (1) *Accountability*, (2) *Participation*, (3) *Rule of Law*, (4) *Transparency*, (5) *Responsiveness*, (6) *Consensus Orientation*, (7) *Equity*, (8) *Effectiveness and Efficiency*, (9)

Strategic Vision.

Akuntabilitas merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini karena akuntabilitas menjadi asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 28 Tahun 1999). Menurut UNDP (1997), akuntabilitas adalah “*decision makers in government, the private sector and civil society organization should be accountable to the public as well as to institutional stakeholders*”. Secara sederhana, akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai sebuah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Kehadiran konsep akuntabilitas berkembang seiring dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia. Implementasi prinsip akuntabilitas diwujudkan salah satunya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa prinsip akuntabilitas merupakan salah satu asas umum penyelenggara negara. Berdasarkan analisis atas regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku di Indonesia saat ini, terdapat setidaknya dua aspek akuntabilitas pemerintah yang dapat mencerminkan *good governance* dan relevan dengan proses pembangunan, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.

1.3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000:28). Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan dengan asas akuntabilitas. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan penyusunan laporan pengelolaan keuangan oleh pemerintah, untuk selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (UU Nomor 1 Tahun 2004). Sebagai media akuntabilitas publik, laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit oleh BPK berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh publik kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Kemudian, dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, efisien, ekonomis dan efektif, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK, sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Opini BPK

No	Jenis Opini
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – <i>Unqualified Opinion</i>
2	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – <i>Qualified Opinion</i>
3	Tidak Wajar (TW) – <i>Adversed Opinion</i>
4	Tidak Memberikan Pendapat (TMP) – <i>Disclaimer of Opinion</i>

Sumber: UU Nomor 15 Tahun 2004

1.3.4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Raba, 2020:76). Mekanisme akuntabilitas kinerja pemerintah kemudian terus berkembang seiring dengan proses reformasi dan desentralisasi yang berlangsung di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah (Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021). Pemerintah menyusun dan menyajikan laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006). Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah secara terukur dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan melalui laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun secara periodik. Laporan SAKIP tersebut kemudian dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk menilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mempercepat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Terdapat tujuh jenis kategori nilai yang diberikan dalam evaluasi SAKIP, sebagaimana pada Tabel 2.

Penelitian terkait pengaruh *good governance* terhadap pembangunan telah dilakukan di berbagai negara. Kajian yang banyak dijadikan rujukan adalah studi ekonometrik yang dilakukan oleh Kaufmann *et al.* berjudul *Governance Matters* (1999), dan *Growth Without Governance* (2002). Penelitian tersebut menganalisis pengaruh *good governance* terhadap pembangunan dengan metode regresi dan menggunakan variabel berupa enam asas atau prinsip *good governance* yang terdiri dari: (1) *voice and accountability*, (2) *political stability and absence of violence*, (3) *government effectiveness*, (4) *regulatory quality*, (5) *rule of law*, (6) *control of corruption*. Hasilnya memberikan bukti empiris mengenai adanya hubungan signifikan antara *good governance* dengan hasil pembangunan berupa *per capita incomes*, *infant mortality*, dan *adult literacy*, di lebih dari 150 sampel negara.

Kajian yang sama dilakukan Kraipornsak (2018) dengan data panel dari 16 sampel negara Asia selama periode tahun 1996-2016. Hasilnya juga menyimpulkan adanya pengaruh positif dan signifikan *good governance* terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita di 16 sampel negara

Asia, dengan simulasi setiap kenaikan *good governance* sebesar 1% dari tahun sebelumnya, dapat membantu proses pembangunan berupa peningkatan pendapatan per kapita sebesar US \$ 31,34 atau 0,54% per tahun.

Tabel 2. Kategori Nilai Evaluasi SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 – 70	Baik Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang mendasar

Sumber: Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015

Hal ini sejalan dengan penelitian Liu *et al.* (2018) yang berjudul *The Effect of Governance Quality on Economic Growth: Based on China's Provincial Panel Data*, yang menyimpulkan bahwa *good governance* memberikan efek positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah berupa pertumbuhan ekonomi wilayah daerah provinsi di Cina. Kemudian, Emara dan Chiu (2016) dengan kajian yang sama di 21 sampel negara di Kawasan *Middle East and North African (MENA)* selama periode tahun 2009-2013, turut memberikan bukti empiris bahwa *good governance* berkorelasi positif dan signifikan dengan proses pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi, dengan simulasi setiap kenaikan *good governance* sebesar 1 unit akan berdampak terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi sekitar 2%.

Sementara itu, Sitompul *et al.* (2022) dalam penelitiannya tentang pengaruh akuntabilitas keuangan pemerintah sebagai salah satu asas *good governance* terhadap pembangunan daerah pada 34 kabupaten/kota di Sumatera Utara periode waktu tahun 2013-2019, menyimpulkan

bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah dengan proksi opini audit atas LKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pembangunan berupa kenaikan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Demikian juga dengan kajian Koesetyawan *et al.* (2022) yang memberikan bukti empiris terkait pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat selama periode waktu tahun 2011-2019. Kemudian, Junaedi (2017) meneliti pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas *good governance* terhadap pembangunan daerah pada 29 daerah provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2014, dan menyimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah yang diproksikan oleh nilai evaluasi atas SAKIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah berupa peningkatan IPM.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yakni analisis regresi data panel yang mengkombinasikan data *time series* dengan data *cross section*. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, periode waktu tahun 2015-2019, yang diperoleh dari instansi terkait yakni BPK, Kemenkeu, Kemenpan Rb, dan BPS. Studi mencakup data empiris 446 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia. Jumlah kabupaten/kota merupakan populasi kabupaten/kota di Indonesia (508 kabupaten/kota), dengan mempertimbangkan pengurangan daerah yang memiliki ketersediaan data yang tidak lengkap selama periode waktu penelitian (62 kabupaten/kota) dan tanpa Jakarta. Model regresi data panel dipilih karena dapat mengontrol heterogenitas sampel yang tidak terobservasi, memberikan data yang lebih informatif, menaikkan derajat kebebasan, mengurangi kolinearitas antar variabel independen, dan lebih mampu mempelajari dinamika penyesuaian dari variabel dependen dan independen, sehingga diperoleh estimasi ekonometrika yang efisien (Baltagi, 2021:357).

Tabel 3. Klasifikasi Wilayah

Seluruh Wilayah Indonesia (Nasional)			
Kawasan Barat Indonesia (KBI)		Kawasan Timur Indonesia (KTI)	
1) Aceh	11) DKI Jakarta	1) Nusa Tenggara Barat	11) Sulawesi Tenggara
2) Sumatera Utara	12) Jawa Barat	2) Nusa Tenggara Timur	12) Gorontalo
3) Sumatera Barat	13) Jawa Tengah	3) Kalimantan Barat	13) Sulawesi Barat
4) Riau	14) DI Yogyakarta	4) Kalimantan Tengah	14) Maluku
5) Jambi	15) Jawa Timur	5) Kalimantan Selatan	15) Maluku Utara
6) Sumatera Selatan	16) Banten	6) Kalimantan Timur	16) Papua Barat
7) Bengkulu	17) Bali	7) Kalimantan Utara	17) Papua
8) Lampung		8) Sulawesi Utara	
9) Kep. Bangka Belitung		9) Sulawesi Tengah	
10) Kep. Riau		10) Sulawesi Selatan	

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian dibagi menjadi 3 klasifikasi wilayah, yakni seluruh wilayah Indonesia (nasional), Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini mempertimbangkan klasifikasi daerah Indonesia menjadi 2 kawasan pembangunan berdasarkan Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015–2019. Klasifikasi wilayah dijelaskan pada Tabel 3.

2.1. Model Persamaan Regresi

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi yang diadaptasi dari riset yang dilakukan oleh Kraipornsak (2018), Samarasinghe (2018), Koesetyawan *et al.* (2022), sebagaimana pada Tabel 4.:

Tabel 4. Model Persamaan Regresi

Persamaan 1	$Y_1 = \alpha + \beta_1.X_{1it} + \beta_2.X_{2it} + \beta_3.X_{3it} + \beta_4.X_{4it} + \beta_5.X_{5it} + \varepsilon_{it}$
Persamaan 2	$Y_2 = \alpha + \beta_1.X_{1it} + \beta_2.X_{2it} + \beta_3.X_{3it} + \beta_4.X_{4it} + \beta_5.X_{5it} + \varepsilon_{it}$
Keterangan	
Y1	Dimensi ekonomi pembangunan daerah (PDRB), sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen
Y2	Dimensi sosial pembangunan daerah (tingkat kemiskinan), sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen
α	Intersep/ <i>constant</i>
$\beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4; \beta_5$	Koefisien regresi (<i>slope</i>) semua unit di masing-masing variabel independen
X1	Akuntabilitas keuangan pemerintah (opini audit atas LKPD), sebagai variabel independen utama
X2	Akuntabilitas kinerja pemerintah (nilai evaluasi atas SAKIP), sebagai variabel independen utama
X3; X4; X5	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus (sebagai variabel kontrol)
ε_{it}	Nilai galat (<i>error</i>) pada unit data tabel silang ke-i dan waktu ke-t

Sumber: Diadaptasi dari Kraipornsak (2018), Samarasinghe (2018), Koesetyawan *et al.* (2022)

Masing-masing persamaan dilakukan regresi berdasarkan klasifikasi wilayah, yakni Nasional (seluruh kabupaten/kota), wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

- 1) Akuntabilitas keuangan pemerintah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap dimensi ekonomi pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia (Y1)
- 2) Akuntabilitas kinerja pemerintah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap dimensi ekonomi pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia (Y1)

- 3) Akuntabilitas keuangan pemerintah (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dimensi sosial pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia (Y2)
- 4) Akuntabilitas kinerja pemerintah (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dimensi sosial pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia (Y2)
- 5) Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus (X3, X4, X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap dimensi ekonomi pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia (Y1)
- 6) Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus (X3, X4, X5) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dimensi sosial pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia (Y2)

2.2. Variabel

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Adapun variabel dependen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dimensi ekonomi dan dimensi sosial pembangunan daerah. Dimensi ekonomi diproksikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang datanya ditransformasikan ke logaritma natural (ln) dan diukur dalam rupiah. Kemudian, dimensi sosial diproksikan oleh tingkat kemiskinan dan diukur dalam persen (%).

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan pemerintah yang diproksikan oleh opini audit atas LKPD, dan akuntabilitas kinerja pemerintah yang diproksikan oleh nilai evaluasi atas SAKIP, sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Akuntabilitas Pemerintah

Variabel	Proksi	Deskripsi
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah	Opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	Proksi yang menunjukkan aspek akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Audit LKPD dilakukan oleh BPK secara independen yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, efisien, ekonomi, efektif dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP diberikan skor 1, sedangkan kabupaten/kota yang tidak memperoleh opini WTP diberikan skor 0. 1 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 0 = Non Wajar Tanpa Pengecualian (Non WTP)
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Proksi yang menunjukkan aspek akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sebagai perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah. Nilai Evaluasi = Skor 0 - 100

Sumber: Permen PANRB 12/2015, UU 15/2004

Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, karena variabel kontrol diduga ikut berpengaruh terhadap variabel dependen. Fungsi variabel kontrol adalah untuk mencegah hasil perhitungan bias. Selain aspek akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah, terdapat banyak variabel lain yang turut mempengaruhi pembangunan daerah, seperti kebijakan fiskal, moneter, faktor politik, dan faktor sosial ekonomi lainnya (Ahmed, 2013). Adapun variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek fiskal pembangunan daerah yakni jumlah realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, yang datanya ditransformasikan ke logaritma natural (\ln) dan diukur dalam rupiah.

Proses estimasi model persamaan regresi data panel menggunakan *software* aplikasi STATA 14.2. Setelah melakukan tahapan proses penentuan model estimasi regresi data panel yang paling baik terhadap persamaan 1 dan persamaan 2 dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman, maka penelitian memperoleh bahwa model yang paling baik adalah metode *Fixed Effect Model* (FEM), sebagaimana pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Hasil Uji Model Persamaan 1

CEM atau FEM (Uji Chow)	FEM atau REM (Uji Hausman)
$F(445, 1779) = 571.40$ $\text{Prob} > F = 0.0000$	Test: Ho: difference in coefficients not systematic $\text{chi2}(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B)$ $= 579.60$ $\text{Prob} > \text{chi2} = 0.0000$
Kesimpulan: Ho diterima = Common Effect Model (CEM) H1 diterima = Fixed Effect Model (FEM) Nilai Prob = 0.0000 atau < 0.05 , maka H1 diterima (FEM)	Kesimpulan: Ho diterima = Random Effect Model (REM) H1 diterima = Fixed Effect Model (FEM) Nilai Prob = 0.0000 atau < 0.05 , maka H1 diterima (FEM)

Sumber: Hasil Uji Model Menggunakan STATA 14.2, 2023

Tabel 7. Hasil Uji Model Persamaan 2

CEM atau FEM (Uji Chow)	FEM atau REM (Uji Hausman)
$F(445, 1779) = 343.21$ $\text{Prob} > F = 0.0000$	Test: Ho: difference in coefficients not systematic $\text{chi2}(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B)$ $= 117.35$ $\text{Prob} > \text{chi2} = 0.0000$
Kesimpulan: Ho diterima = Common Effect Model (CEM) H1 diterima = Fixed Effect Model (FEM) Nilai Prob = 0.0000 atau < 0.05 , maka H1 diterima (FEM)	Kesimpulan: Ho diterima = Random Effect Model (REM) H1 diterima = Fixed Effect Model (FEM) Nilai Prob = 0.0000 atau < 0.05 , maka H1 diterima (FEM)

Sumber: Hasil Uji Model Menggunakan STATA 14.2, 2023

2.3. Tes Diagnostik *Fixed Effect Model* (FEM)

Tes diagnostik atau uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Model regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*

(FEM) akan memberikan hasil pendugaan yang valid sebagai alat peramalan jika asumsi klasik terpenuhi. Adanya korelasi yang kuat (multikolinearitas) antara variabel independen dalam pembentukan sebuah *Fixed Effect Model* (FEM) sangatlah tidak dianjurkan terjadi karena akan berdampak pada keakuratan pendugaan parameter regresi (Gujarati, 2003). Adapun hasil tes diagnostik multikolinearitas adalah sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

	Akun_Keuangan	Akun_Kinerja	ln_PAD	ln_DAU	ln_DAK
Akun_Keuangan	1				
Akun_Kinerja	0.3227	1			
ln_PAD	0.2586	0.5271	1		
ln_DAU	0.1251	0.2789	0.6464	1	
ln_DAK	0.1485	0.2367	0.2506	0.5446	1

Sumber: Hasil Diolah Menggunakan STATA 14.2, 2023

Berdasarkan hasil uji *Pairwise Correlation Matrix*, diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel independen dalam penelitian ini tidak menunjukkan hubungan sempurna (multikolinearitas). Hal ini disimpulkan dari nilai korelasi matriks antara seluruh variabel independen sesuai Tabel 8 adalah dibawah nilai 0,8 (Napitupulu *et al.*, 2021). Sementara itu, hasil tes diagnostik heteroskedastisitas dan autokorelasi atas persamaan 1 dan persamaan 2 adalah sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Persamaan 1		
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model	Prob>chi2 = 0,0000 chi2 = 2,3e+05	Nilai Prob>chi2 = 0,0000 atau lebih kecil dari nilai α 0,05, sehingga disimpulkan terdapat heteroskedastisitas
Wooldridge test for autocorrelation in panel data	Prob > F = 0,0000 F-Stat = 582,783	Nilai Prob > F = 0,0000 atau lebih kecil dari nilai α 0,05, sehingga disimpulkan terdapat autokorelasi
Persamaan 2		
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model	Prob>chi2 = 0,0000 chi2 = 82355,76	Nilai Prob>chi2 = 0,0000 atau lebih kecil dari nilai α 0,05, sehingga disimpulkan terdapat heteroskedastisitas
Wooldridge test for autocorrelation in panel data	Prob > F = 0,0000 F-Stat = 576,511	Nilai Prob > F = 0,0000 atau lebih kecil dari nilai α 0,05, sehingga disimpulkan terdapat autokorelasi

Sumber: Hasil Diolah Menggunakan STATA 14.2, 2023

2.4. *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Robust Standard Errors*

Fixed Effect Model (FEM) dalam penelitian ini telah diestimasi dengan menggunakan metode *Robust Standard Errors*. Hal ini dilakukan untuk mengatasi model dari masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi sebagaimana kesimpulan hasil uji pada Tabel 9. *Robust Standard Errors* melakukan koreksi terhadap nilai standar *error* dan memperbaiki model dari kekeliruan pendugaan parameter regresi, sehingga masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dapat teratasi (Samarasinghe, 2018).

III. Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan estimasi dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Robust Standard Errors* tentang pengaruh akuntabilitas pemerintah terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia (Persamaan 1 dan Persamaan 2), baik secara Nasional (semua kabupaten/kota) maupun berdasarkan wilayah KBI dan wilayah KTI, diperoleh hasil sebagaimana pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Persamaan 1

Variabel Independen	Variabel Dependen		
	DIMENSI EKONOMI PEMBANGUNAN DAERAH In_PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)		
	Nasional (Semua Kab/ Kota)	Wilayah KBI	Wilayah KTI
Akuntabilitas Keuangan	0.0180*** (0.00482)	0.0133** (0.00563)	0.0274*** (0.00918)
Akuntabilitas Kinerja	0.00631*** (0.000568)	0.00630*** (0.000417)	0.00616*** (0.00113)
In_PAD	0.0833*** (0.0112)	0.0825*** (0.00882)	0.0832*** (0.0186)
In_DAU	0.163*** (0.0563)	0.0933 (0.0656)	0.254*** (0.0928)
In_DAK	0.0170*** (0.00389)	0.0220*** (0.00406)	0.00849 (0.00819)
Constant	12.30*** (0.730)	13.52*** (0.831)	10.76*** (1.194)
Number of observations	2.230	1.280	950
R-squared	0.6336	0.7352	0.5524
Number of groups	446	256	190
R-squared between	0.6802	0.6579	0.5310
R-squared over all	0.6264	0.5980	0.4703
Prob > F	0.0000	0.0000	0.0000

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Hasil Diolah Menggunakan STATA 14.2, 2023

Persamaan 1:

$$\text{Nasional} : Y_1 = 12.30 + 0.0180 X_1 + 0.00631 X_2 + 0.0833 X_3 + 0.163 X_4 + 0.0170 X_5$$

$$\text{KBI} : Y_1 = 13.52 + 0.0133 X_1 + 0.00630 X_2 + 0.0825 X_3 + 0.0933 X_4 + 0.0220 X_5$$

$$\text{KTI} : Y_1 = 10.76 + 0.0274 X_1 + 0.00616 X_2 + 0.0832 X_3 + 0.254 X_4 + 0.00849 X_5$$

3.1. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Pemerintah terhadap Dimensi Ekonomi Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil regresi disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap dimensi ekonomi pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pengaruh positif dan signifikan ini terjadi secara konsisten pada regresi data panel baik secara nasional (semua kabupaten/kota), maupun secara regional di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hasil ini sesuai dengan kajian Sitompul *et al.* (2022) yang juga menyimpulkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara akuntabilitas keuangan dengan proksi opini audit atas LKPD terhadap pembangunan daerah berupa kenaikan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 34 kabupaten/kota wilayah provinsi Sumatera Utara periode waktu tahun 2013-2019.

3.1.1. Nasional (Semua Kabupaten/Kota)

Hasil regresi data semua kabupaten/kota (Nasional) memperoleh nilai koefisien sebesar 0,0180. Hal ini menunjukkan bahwa, secara nasional (semua kabupaten/kota), setiap kenaikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sebesar 1 poin atau dalam penelitian ini berarti mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi ekonomi pembangunan daerah berupa kenaikan PDRB sebesar 1,80 poin (*ceteris paribus*).

Nilai koefisien determinasi atau *R-Squared* (R^2) sebesar 0,6336, artinya bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 63,36%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor diluar model. Nilai konstanta atau koefisien *intercept* dalam model sebesar 12,30 menunjukkan bahwa bila semua variabel independen bernilai nol, maka variabel dependen adalah sebesar 12,30. Nilai Prob > F sebesar 0,0000, lebih kecil dari nilai α 0,05, artinya bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3.1.2. Wilayah KBI

Hasil regresi data kabupaten/kota wilayah KBI memperoleh nilai koefisien sebesar 0,0133. Hal ini menunjukkan bahwa, secara khusus untuk wilayah KBI, setiap kenaikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sebesar 1 poin atau dalam penelitian ini berarti mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi ekonomi pembangunan daerah berupa kenaikan PDRB sebesar 1,3 poin (*ceteris paribus*).

Nilai koefisien determinasi atau *R-Squared* (R^2) sebesar 0,7352, artinya bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 73,52%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor diluar model. Nilai konstanta atau koefisien *intercept* dalam model sebesar 13,52 menunjukkan bahwa bila semua variabel independen bernilai nol, maka variabel dependen adalah sebesar 13,52. Nilai Prob > F sebesar 0,0000, lebih kecil dari nilai α 0,05, artinya bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3.1.3. Wilayah KTI

Hasil regresi data kabupaten/kota KTI memperoleh nilai koefisien sebesar 0,0274. Hal ini menunjukkan bahwa, secara khusus untuk wilayah KTI, setiap kenaikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sebesar 1 poin atau dalam penelitian ini berarti mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi ekonomi pembangunan daerah berupa kenaikan PDRB sebesar 2,7 poin (*ceteris paribus*).

Nilai koefisien determinasi atau *R-Squared* (R^2) sebesar 0,5524, artinya bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 55,24%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor diluar model. Nilai konstanta atau koefisien *intercept* dalam model sebesar 10,76 menunjukkan bahwa bila semua variabel independen bernilai nol, maka variabel dependen adalah sebesar 10,76. Nilai Prob > F sebesar 0,0000, lebih kecil dari nilai α 0,05, artinya bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3.2. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terhadap Dimensi Ekonomi Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil regresi disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap dimensi ekonomi pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pengaruh positif dan signifikan ini terjadi secara konsisten pada regresi data panel secara nasional (semua kabupaten/kota), maupun secara regional di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hasil ini sesuai dengan kajian Liu *et al.* (2018) yang meneliti pengaruh kualitas pemerintah dengan menggunakan *government capacity* sebagai proksi akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap pembangunan daerah provinsi di Cina. Penelitian tersebut menyimpulkan akuntabilitas kinerja pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan daerah provinsi di Cina berupa kenaikan produk domestik bruto.

3.2.1. Nasional (Semua Kabupaten/Kota)

Hasil regresi data semua kabupaten/kota (Nasional) memperoleh nilai koefisien sebesar 0,00631. Hal ini menunjukkan bahwa, secara nasional (semua kabupaten/kota), setiap kenaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebesar 1 poin, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi ekonomi pembangunan daerah berupa kenaikan PDRB sebesar 0,631 poin (*ceteris paribus*).

3.2.2. Wilayah KBI

Hasil regresi data kabupaten/kota wilayah KBI memperoleh nilai koefisien sebesar 0,0630. Hal ini menunjukkan bahwa, secara khusus untuk wilayah KBI, setiap kenaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebesar 1 poin, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi ekonomi pembangunan daerah berupa kenaikan PDRB sebesar 0,630 poin (*ceteris paribus*).

3.2.3. Wilayah KTI

Hasil regresi data kabupaten/kota KTI memperoleh nilai koefisien sebesar 0,00616. Hal ini menunjukkan bahwa, secara khusus untuk wilayah KTI, setiap kenaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebesar 1 poin, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi ekonomi pembangunan daerah berupa kenaikan PDRB sebesar 0,616 poin (*ceteris paribus*).

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Persamaan 2

Variabel Independen \ Variabel Dependen	DIMENSI SOSIAL PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat Kemiskinan		
	Nasional (Semua Kab/ Kota)	Wilayah KBI	Wilayah KTI
Akuntabilitas Keuangan	-0.196** (0.0844)	-0.241** (0.107)	-0.0766 (0.129)
Akuntabilitas Kinerja	-0.0596*** (0.00460)	-0.0638*** (0.00606)	-0.0544*** (0.00681)
ln_PAD	-0.232** (0.108)	-0.526*** (0.186)	-0.0123 (0.112)
ln_DAU	-0.841* (0.430)	-1.118 (0.737)	-0.993* (0.547)
ln_DAK	-0.120*** (0.0420)	-0.117* (0.0603)	0.0445 (0.0660)
Constant	30.50*** (5.399)	37.37*** (9.515)	28.62*** (6.538)
Number of observations	2.230	1.280	950
R-squared	0.3861	0.4397	0.3305
Number of groups	446	256	190
R-squared between	0.1177	0.0499	0.1801
R-squared overall	0.1125	0.0609	0.1342
Prob > F	0.0000	0.0000	0.0000

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Hasil Diolah Menggunakan STATA 14.2, 2023
Persamaan 2:

1. Nasional : $Y_2 = 30.50 - 0.196 X_1 - 0.0596 X_2 - 0.232 X_3 - 0.841 X_4 - 0.120 X_5$
2. KBI : $Y_2 = 37.37 - 0.241 X_1 - 0.0638 X_2 - 0.526 X_3 - 1.118 X_4 - 0.117 X_5$
3. KTI : $Y_2 = 28.62 - 0.0766 X_1 - 0.0544 X_2 - 0.0123 X_3 - 0.993 X_4 + 0.0445 X_5$

3.3. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Pemerintah terhadap Dimensi Sosial Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil regresi disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki hubungan signifikan terhadap dimensi sosial pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Namun, pengaruh negatif dan signifikan hanya terjadi pada regresi data panel secara nasional (semua kabupaten/kota) dan wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hasil ini sesuai dengan kajian Koesetyawan *et al.* (2022) tentang analisis pengaruh akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah periode tahun 2011-2019. Penelitian tersebut menyimpulkan akuntabilitas keuangan pemerintah yang diprosikan oleh opini audit atas LKPD berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah berupa kenaikan kesejahteraan masyarakat yang diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sementara itu, di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), akuntabilitas keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap dimensi sosial pembangunan daerah. Salah satu kemungkinan penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena pengaruh tingkat kepatuhan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan audit yang masih rendah. Hal ini sesuai dengan data Daftar Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK, periode

tahun 2015-2019, yang mencatat bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan rekomendasi BPK hanya mencapai 61,34% atau hanya 91.262 dari total 148.762 rekomendasi.

3.3.1. Nasional (Semua Kabupaten/Kota)

Hasil regresi data semua kabupaten/kota (Nasional) memperoleh nilai koefisien sebesar -0,196. Hal ini menunjukkan bahwa, secara nasional (semua kabupaten/kota), setiap kenaikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sebesar 1 poin atau dalam penelitian ini berarti mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi sosial pembangunan daerah berupa penurunan tingkat kemiskinan sebesar -19,60 poin (*ceteris paribus*).

Nilai koefisien determinasi atau *R-Squared* (R^2) sebesar 0,3861, artinya bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 38,61%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor diluar model. Nilai konstanta atau koefisien *intercept* dalam model sebesar 30,50 menunjukkan bahwa bila semua variabel independen bernilai nol, maka variabel dependen adalah sebesar 30,50. Nilai Prob > F sebesar 0,0000, lebih kecil dari nilai α 0,05, artinya bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3.3.2. Wilayah KBI

Hasil regresi data kabupaten/kota wilayah KBI memperoleh nilai koefisien sebesar -0,241. Hal ini menunjukkan bahwa, secara khusus untuk wilayah KBI, setiap kenaikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sebesar 1 poin atau dalam penelitian ini berarti mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi sosial pembangunan daerah berupa penurunan tingkat kemiskinan sebesar -24,10 poin (*ceteris paribus*).

Nilai koefisien determinasi atau *R-Squared* (R^2) sebesar 0,4397, artinya bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 43,97%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor diluar model. Nilai konstanta atau koefisien *intercept* dalam model sebesar 37,37 menunjukkan bahwa bila semua variabel independen bernilai nol, maka variabel dependen adalah sebesar 37,37. Nilai Prob > F sebesar 0,0000, lebih kecil dari nilai α 0,05, artinya bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3.3.3. Wilayah KTI

Hasil regresi data kabupaten/kota KTI memperoleh nilai koefisien sebesar -0,0766. Hal ini menunjukkan bahwa, secara khusus untuk wilayah KTI, setiap kenaikan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sebesar 1 poin atau dalam penelitian ini berarti mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, akan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap peningkatan dimensi sosial pembangunan daerah berupa penurunan tingkat kemiskinan sebesar -0,766 poin (*ceteris paribus*).

Nilai koefisien determinasi atau *R-Squared* (R^2) sebesar 0,3305, artinya bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 33,05%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor diluar model. Nilai konstanta atau koefisien *intercept* dalam model sebesar 28,62 menunjukkan bahwa bila semua variabel independen bernilai nol, maka variabel dependen adalah sebesar 28,62. Nilai Prob > F sebesar 0,0000, lebih kecil dari nilai α 0,05, artinya bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3.4. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terhadap Dimensi Sosial Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil regresi disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap dimensi sosial pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pengaruh negatif dan signifikan ini terjadi secara konsisten pada regresi data panel secara nasional (semua kabupaten/kota), maupun secara regional di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini sesuai dengan kajian Junaedi (2017) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas kinerja sebagai asas *good governance* terhadap pembangunan daerah pada 29 daerah provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2014. Hasilnya juga menyimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja yang diprosikan oleh nilai evaluasi atas SAKIP berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah berupa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan interpretasi setiap kenaikan akuntabilitas kinerja sebesar 1 poin akan meningkatkan IPM secara rata-rata sebesar 0,001. Liu *et al.* (2018) dengan menggunakan *government capacity* sebagai proksi akuntabilitas kinerja pemerintah, juga menyimpulkan adanya hubungan signifikan antara akuntabilitas kinerja pemerintah dengan pembangunan daerah provinsi di Cina.

3.4.1. Nasional (Semua Kabupaten/Kota)

Hasil regresi data semua kabupaten/kota (nasional) memperoleh nilai koefisien sebesar -0,0596. Hal ini menunjukkan bahwa, secara nasional (kabupaten/kota) setiap kenaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebesar 1 poin, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi sosial pembangunan daerah berupa penurunan tingkat kemiskinan sebesar -5,96 poin (*ceteris paribus*).

3.4.2. Wilayah KBI

Hasil regresi data kabupaten/kota wilayah KBI memperoleh nilai koefisien sebesar -0,0638. Hal ini menunjukkan bahwa, secara khusus untuk wilayah KBI, setiap kenaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebesar 1 poin, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi sosial pembangunan daerah berupa penurunan tingkat kemiskinan sebesar -6,38 poin (*ceteris paribus*).

3.4.3. Wilayah KTI

Hasil regresi data kabupaten/kota KTI memperoleh nilai koefisien sebesar -0,0544. Hal ini menunjukkan bahwa, secara khusus untuk wilayah KTI, setiap kenaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebesar 1 poin, akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dimensi sosial pembangunan daerah berupa penurunan tingkat kemiskinan sebesar -5,44 poin (*ceteris paribus*).

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Studi melalui estimasi regresi data panel tentang pengaruh akuntabilitas pemerintah terhadap pembangunan daerah, dengan mempergunakan data 446 kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015-2019, menghasilkan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Hasil kajian menerima hipotesis (arah hubungan dan signifikansi) mengenai pengaruh akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap dimensi ekonomi pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pengaruh positif dan signifikan terjadi konsisten baik secara nasional (semua kabupaten/kota), maupun secara regional di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas

keuangan pemerintah juga berpengaruh signifikan (sesuai hipotesis) terhadap dimensi sosial pembangunan daerah secara nasional dan di wilayah KBI, namun berpengaruh tidak signifikan di wilayah KTI. Salah satu kemungkinan penyebab akuntabilitas keuangan pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap dimensi sosial pembangunan daerah di wilayah KTI adalah karena dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan audit yang masih rendah. Hal ini sesuai dengan data Daftar Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK, periode tahun 2015-2019, yang mencatat bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan rekomendasi BPK hanya mencapai 61,34% atau hanya 91.262 dari total 148.762 rekomendasi.

2. Hasil kajian menerima hipotesis (arah hubungan dan signifikansi) mengenai pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap dimensi ekonomi pembangunan daerah, dan menerima hipotesis mengenai pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap dimensi sosial pembangunan daerah. Pengaruh signifikan terjadi konsisten baik secara nasional (semua kabupaten/kota), maupun secara regional di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).
3. Hasil kajian ini turut memberikan bukti mengenai adanya pengaruh penting akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai asas *good governance* dalam upaya mendorong capaian pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia.
4. Secara umum, hasil regresi variabel kontrol, yakni realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus juga menguatkan hipotesis penelitian, sehingga dapat disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Hal ini karena dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah turut serta dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik melalui pendekatan *assurance* (audit, evaluasi, reviu, monitoring) maupun *consulting* (pendampingan, bimbingan teknis, sosialisasi), ke arah upaya peningkatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan, dan upaya tindakan pencegahan sehingga dapat mengurangi risiko yang buruk terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.
2. Pengawasan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah selanjutnya juga membutuhkan peran aktif DPRD selaku lembaga yang secara konstitusi memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta membutuhkan adanya perbaikan proses transparansi melalui keterbukaan akses informasi publik untuk mendorong partisipasi masyarakat, akademisi, dan lembaga pemerhati penyelenggara pemerintahan, dalam mengetahui dan mengawasi akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah.
3. Mengkaji kembali kebijakan yang telah ada mengenai pemberian *reward* berupa dana insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja agar lebih menarik. Hal ini dapat dilakukan melalui desain dana insentif yang lebih

menarik dari aspek besaran alokasi dana, aspek hukum, kriteria penilaian, maupun tujuan dan sifat penggunaannya, agar mampu memotivasi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan akuntabilitasnya.

4. Mengingat Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi (*high income*) dan menjadi salah satu PDB terbesar dunia, diperlukan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir kurang dari target tersebut, yakni hanya 4% per tahun selama 2015-2022 (BPS, 2023), maka perbaikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas *good governance* dapat menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmed, M. (2013). *Fiscal Decentralisation and Political Economy of Poverty Reduction Reduction: Theory and Evidence from Pakistan*. Durham University. <http://etheses.dur.ac.uk/7288/>.
- Asian Development Bank. (1995). *Governance: Sound Development Management*. Manila, Philippines. <https://www.adb.org/documents/governance-sound-development-management>.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometrics. Sixth Edition*. Springer Nature Switzerland AG. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Berita Resmi Statistik*. <https://www.bps.go.id/brs.html>. 13 Februari 2023 (10.11).
- Emara, N. Chiu, I. (2016). The Impact of Governance on Economic Growth: The Case of Middle Eastern and North African Countries. *MPRA Paper 68603*. 18(1). <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68603/>.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics. Fourth Edition*. McGraw-Hill. New York.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 15 Juni 1999. Jakarta
- International Fund for Agricultural Development. (1999). Good Governance: An Overview. EB 99/67/INF.4/ IFAD. Rome. https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/pregled-dobro_upravljenje.pdf.
- International Monetary Fund. (2018). Laporan Tahunan IMF 2018, Tinjauan Umum. IMF. Washington, DC 20431 USA. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2018-id.pdf>.
- Junaedi, D. (2017). Pengaruh Good Governance serta Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM pada 29 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014. *Tesis*. Program Magister Ekonomi Terapan Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Kaufmann, D. Kraay, A. & Lobaton, P. Z. (1999). Governance Matters. *Policy Research Working Paper 2196*. The World Bank. Washington, DC 20433. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2196>.

- Kaufmann, D. Kraay, A. (2002). Growth Without Governance. *Policy Research Working Paper 2928*. The World Bank. Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2928>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 13 November 1998. Jakarta.
- Koesetyawan, A. Harliani, M. & Yuvrita, D. (2022). Analisis Pengaruh Opini LKPD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Kajian DIT APK Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. KNGK. Jakarta. https://drive.google.com/file/d/13Ab88RMxnlP6eUsBeB_oABoNV6ZgYlpl/view
- Kraipornsak, P. (2018). Good Governance and Economic Growth: An Investigation of Thailand and Selected Asian Countries. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6(1):93-106. DOI: 10.15604/ejef.2018.06.01.009. <https://eurasianpublications.com/wp-content/uploads/2021/02/EJEF-6.1.9.pdf>
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Modul 1: Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta 10110. <http://kms.ipb.ac.id/1715/>.
- Liu, J. Tang, J. Zhou, B. & Liang, Z. (2018). The Effect of Governance Quality on Economic Growth: Based on China's Provincial Panel Data, 6(56). *MDPI Journals*. <https://doi.org/10.3390/economies6040056>.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Napitupulu, R. B. Simanjuntak, T. P. Hutabarat, L. Damanik, H. Harianja, H. Sirait, R T. M. & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisis Data dengan SPSS – STATA – Eviews. Edisi 1*. Madenatera. Bekasi, Jawa Barat.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 31 Desember 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569. Jakarta.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015. *Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 22 Juni 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 3 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. 8 Januari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3. Jakarta.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi*. UMM Press. Malang.
- Samarasinghe, T. (2018). Impact of Governance on Economic Growth. *MPRA Paper 89834*. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89834/>.
- Sen, K. (2014). Governance and Development Outcomes in Asia. *ADB Economics Working Paper Series*, (384). <https://www.adb.org/publications/governance-and-development->

outcomes-asia.

- Sitompul, M. M. R. Situmeang, S. Lourens, W. P. Iqbal, M. S. Jelita, R. S. & Deanery, P. P. (2022). Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah, Tingkat Kemiskinan, Laju PDRB, Kemandirian Fiskal, dan Opini LKPD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Kajian DIT APK Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. 19 Mei 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 19 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. Community Organization, Training, Research, and Advocacy Institute (CO-TRAIN). Philippines. <https://digitallibrary.un.org/record/3831662?ln=en>.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. The International Bank for Reconstruction and Development. Washington, DC 20433. <https://doi.org/10.1596/0-8213-2094-7>.
- World Bank. (1994). *Governance: The World Bank's Experience*. The International Bank for Reconstruction and Development. Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/0-8213-2804-2>.